

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini dapat menyimpulkan mencakup *Directing* (pengarahan) dimensi komunikasi efektif, motivasi, pengawasan, kepemimpinan, pemberdayaan karyawan sebagai berikut. Dalam Pelaksanaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dapat disimpulkan dalam pelaksanaan DUPAK bahwa pada 246 penggerak swadaya masyarakat ini macet dalam pengumpulan angka kreditnya. Dikarenakan belum maksimalnya DUPAK pada Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Kementerian Desa.

Faktor utama dalam terhambatnya dalam penyusunan serta pengumpulan daftar usulan penilain angka kredit dalam kenaikan pangkat jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yaitu, pengarahannya belum berjalan sepenuhnya karena yang pertama itu tidak pemahamannya butir-butir yang terdapat di Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK), tidak memahami tugas dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), poin kegiatan yang terlalu kecil di setiap unit kerja masing-masing, tidak semuanya PSM di Kementerian desa itu terjun langsung menghadapi masyarakat dimana itu merupakan salah satu unsur dari unsur utama dalam penyusunan angka kredit, kurang nya anggaran serta kegiatan pasca pandemi, serta pembagian formasi jabatan yang tidak merata.

Faktor kedua sangat penting untuk memiliki bakat, kreativitas, dan etos kerja untuk para jabatan fungsional Kementerian Desa PDPTT. Penyebabnya yaitu

masih kurangnya program pendidikan, bimbingan dalam penyusunan angka kredit, serta sosialisasi atasan pun belum berjalan dengan sesuai. Akibatnya banyak pejabat penggerak swadaya masyarakat yang belum memahamai mengenai pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

Faktor ketiga itu adalah formasi pegawai yang tidak merata. Hal ini menyebabkan penggerak swadaya masyarakat Memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian seseorang dapat membuat sulit untuk mendapatkan kredit dari unit kerja lain atau bahkan untuk memajukan pengetahuan dan pekerjaannya. Faktor-faktor tersebut yang membuat pelaksanaan DUPAK pada Penggerak Swadaya Masyarakat di Kementerian Desa ini tidak berjalan semestinya karena itu penggerak menjadi malas dalam penyusunan angka kredit kemudian proses yang sangat lama.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang diperoleh, peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Kementerian desa di dalamnya. Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. Perlu adanya penataan ulang terhadap formasi penggerak swadaya masyarakat di masing-masing unit kerja di Kementerian Desa PDTT yang disesuaikan dengan formasi yang merata.
2. Perlu adanya bimbingan teknis bagi pegawai yang hendak ingin naik jabatan dalam penyusunan serta pemahaman DUPAK.

3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi mengenai peraturan yang sudah sesuai di SKHK dalam penyusunan DUPAK.
4. Perlu adanya peningkatan komunikasi dan sosialisasi terhadap para pimpinan di masing-masing unit kerja terkait tugas pokok dan fungsi.
5. Perlu adanya evaluasi secara berkala mengenai jumlah pegawai di masing-masing unit kerja.
6. Perlu adanya evaluasi butir kegiatan yang disesuaikan dengan pekerjaan nyata yang dilapangan.
7. Perlu adanya peningkatan kreativitas dan kemandirian kerja dari penggerak swadaya masyarakat yang bersangkutan sehingga dapat menciptakan kegiatan baru yang kmenghasilkan angka kredit.
8. Perlu adanya *reason* terhadap penilaian dan pentapan angka kredit, khususnya bagi penggerak swadaya masyarakat yang sudah mengumpulkan lalu dinilai oleh tim penilai, tim penilai memberikan *reason* setelah dinilai agar mengetahui kesalahan di butir-butir apa saja agar untuk kedepannya penggerak mengetahui kesalahannya lalu diperbaiki.